



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, Februari 2026
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR	3
2.1 Visi Dan Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar.....	3
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2.3 Standard Operating Proscedure (SOP) Inspektorat Kabupaten Karanganyar.....	6
2.4 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan	6
2.5 Struktur Organisasi	7
2.6 Kepegawaian	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9
3.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	9
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	15
4.1 Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengawasan	15
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	16
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL ..	17
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	18
BAB VIII PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi, informasi dan kedewasaan masyarakat di era saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai modal pencapaian peran pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan bersih (*clean goverment*) di Kabupaten Karanganyar, perlu ditopang dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Manajemen pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dari siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena suatu proses maka kegiatan yang dilakukan tidak ada akhirnya, secara berkesinambungan proses tersebut harus mengarah kepada semakin dekatnya pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan mempunyai peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar berperan sebagai umpan balik dalam penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah berfungsi memberikan jasa kegiatan yang bersifat *early warning system* (peringatan dini), konsultasi, dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan berjalannya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar, perlu didukung jalinan komunikasi dengan baik antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan OPD lain di Kabupaten Karanganyar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Karanganyar, melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dan Satuan Polis! Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029;
6. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk :

1. Memberikan informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar **“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Tangguh”**.

Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu mengacu pada Visi tersebut maka disusunlah Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengawasan yang Berkualitas, Handal dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tercapainya Pemerintahan yang Baik;
3. Melaksanakan Koordinasi dan atau Konsultasi Pengawasan Menuju Pengawasan yang Lebih Sinergis;
4. Melaksanakan Pemantauan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pengawasan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dengan prioritas kegiatannya antara lain :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan dan Asistensi tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5. Penyelenggaraan penerapan SPIP dalam tata kelola pemerintahan.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. *STANDARD OPERATING PROSCEDURE (SOP)* INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan maka Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan SOP guna mencapai tujuan tugas dengan efektif dan efisien. SOP tersebut ditetapkan dalam Keputusan Inspektorat Kabupaten Karanganyar No. 900/35/2013 Tentang SOP dan Prosedur Pemeriksaan yang terdiri dari SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, SOP Inspektorat Pemeriksaan Khusus, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Inspektorat Pemeriksaan Tujuan Tertentu, dan SOP Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

D. PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
4. Sura Keputusan Bupati Nomor 700/55 tahun 2026 tgl 2 januari 2026 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan APIP Tahun 2026.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

D. KEPEGAWAIAN

Tabel 2.1 DAFTAR PEGAWAI INSPEKTORAT PER TANGGAL 2 JANUARI 2026

NO	NAMA	STATUS	JABATAN
1	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	PNS	Inspektur Daerah
2	Dra. ENY FAUZIAH, M.M.	(IV/b)	Sekretaris Inspektorat Daerah
3	DAHONO, S.I.P., M.Si.	(IV/b)	Plt. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur
4	DWI SAPTOHAJI, SP., M.M.	(IV/b)	Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	(IV/b)	Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
6	DAHONO, S.I.P., M.Si.	(IV/b)	Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
7	AGUS MURDIYANTO, S.E., M.M.	(IV/a)	Inspektur Pembantu Khusus
8	PERMATA ARIYANTO NUGROHO, S.E., M.M.	(III/d)	Kasubbag Administrasi dan Umum
9	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	(III/c)	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

NO	NAMA	STATUS	JABATAN
10	NURUL BADRIYAH, S.E.	(III/d)	Perencana Ahli Muda
11	HENI KUSTYAWATI, S.H., M.M.	(IV/c)	P2UPD Madya
12	RETNO RINAWATI, S.H., M.M.	(IV/b)	Auditor Madya
13	TRI WULAN AJI, S.Sos., M.M.	(IV/b)	Auditor Kepegawaian Madya
14	MULYATI, S.E., M.Acc, CFrA, CPSP.	(IV/b)	Auditor Madya
15	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos.	(IV/b)	Auditor Madya
16	Dra. SUNARMI, M.M.	(IV/a)	P2UPD Madya
17	HARTUTI, S.E.	(IV/a)	P2UPD Madya
18	ENDANG SRI SUHARTI, S.E., CFrA.	(IV/a)	Auditor Madya
19	RAHDRIAWATI, S.IP.	(III/d)	Auditor Kepegawaian Muda
20	BASRI SETYOWATI, S.Sos	(III/d)	P2UPD Muda
21	C. ANDI MURTOPO, S.Sos	(III/d)	P2UPD Muda
22	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si	(III/d)	Auditor Muda
23	INNAHA RAHMAWATI, S.E, M.Si	(III/d)	Auditor Muda
24	SURYA AFRIZAL, S.H., M.M.	(III/d)	Calon Auditor
25	DEWI SURYANINGSIH, S.H.	(III/d)	Calon Auditor
26	RETNO WULANDARI, S.H.	(III/d)	Calon Auditor
27	MIYA SUNDARI, S.H.	(III/d)	Calon Auditor
28	CATHARINA TRIANDARI TRISMANINGRUM, S.E., M.M.	(III/d)	Calon Auditor
29	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.	(III/d)	Penyusun Rencana Pengawasan
30	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.	(III/c)	P2UPD Muda
31	RISKHA AMALLIA I, S.H., M.Si	(III/c)	Auditor Muda
32	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.	(III/c)	Auditor Muda
33	WAHYUNINGSIH, S.H.	(III/c)	Auditor Muda
34	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si	(III/c)	Auditor Muda
35	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.	(III/c)	Auditor Muda
36	ARTTIKA RAHMA SARI, S.E., M.Ak.	(III/c)	Auditor Muda
37	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.	(III/c)	Auditor Muda
38	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.	(III/c)	Auditor Muda
39	SUPRAYITNO, S.T.	(III/c)	Auditor Muda
40	SUTIRAH DUWI RAHAYU, S.P.	(III/b)	Auditor Pertama
41	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, S.E.	(III/b)	Penata Laporan Keuangan
42	FAUZY HENDRO PURNOMO, S.E.	(III/b)	Analisis Penyelesaian LHP
43	JAKA MARYANTO, S.H.	(III/a)	Auditor Pertama
44	ENDANG YUNIATI, S.Ak.	(III/a)	Bendahara
45	PURWADI	(II/d)	Pengadministrasi Umum
46	IIS ISTIQOMAH NUR FAJAR, A.Md	(II/c)	Auditor Terampil
47	NUR INDAH SARI, A.Md	(II/c)	Auditor Terampil
48	WAHYU KRISTIYANTO, A.Md.Kom.	(II/c)	Pranata Komputer Terampil
49	SUGIYONO	(II/c)	Petugas Keamanan
50	AGUS SUPRAPTO, SE	THL	Pengadministrasi
51	ANGGIT APRILIYA PAMUNGKAS	THL	Pengadministrasi Kendaraan Dinas

NO	NAMA	STATUS	JABATAN
53	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	THL	Pengadministrasi Keamanan Dan Ketertiban
54	SHINTA PUTRI SARI, S.E.	THL	Pengadministrasi Kebersihan
55	SEKAR RIZKY MAHANANI, S.Pd.	THL	Pengadministrasi
56	DWI KURNIAWATI	THL	Resepsionis
57	PRISCHA RINNA SETIYANINGSIH, S.I.Kom.	THL	Pengadministrasi

2.2 DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	INSPEKTUR DAERAH	Memenuhi	Memenuhi
2.	Dra. ENY FAUZIAH, M.M.	SEKRETARIS	Memenuhi	Memenuhi
3.	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	Memenuhi	Memenuhi
4.	DAHONO, S.I.P., M.Si.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	Memenuhi	Memenuhi
5.	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	Memenuhi	Memenuhi
6.	DAHONO, S.I.P., M.Si.	Plt. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	Memenuhi	Memenuhi
7.	AGUS MURDIYANTO, S.E., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	Memenuhi	Memenuhi
8.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Memenuhi	Memenuhi
9.	PERMATA ARIYANTO NUGROHO, S.E., M.M.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	Memenuhi	Memenuhi

2.3 DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.	198510212010011011	AUDITOR AHLI MUDA
2.	TRI WULAN AJI, S.Sos., M.M.	196605031998032003	AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA
3.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.	196604161998032001	AUDITOR MADYA
4.	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos.	196504301986032011	AUDITOR MADYA
5.	MULYATI, S.E., M.Acc.	197408101999032006	AUDITOR MADYA
6.	RETNO RINAWATI, S.H., M.M.	196801311996032003	AUDITOR MADYA
7.	RAHDRIAWATI, S.I.P.	196703201989012001	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA
8.	Dra. SUNARMI, M.M.	196603161998032005	P2UPD MADYA
9.	HARTUTI, S.E.	196612241993032007	P2UPD MADYA
10.	HENI KUSTIYAWATI, S.H., M.M.	196805201994032009	P2UPD MADYA
11.	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si.	198305242009021004	AUDITOR MUDA
12.	INNAHA RAHMAWATI, S.E., OM.Si.	197712112009022001	AUDITOR MUDA
13.	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.	198308072009021003	AUDITOR MUDA
14.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.	198211182010011022	AUDITOR MUDA
15.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.	197801182010011010	AUDITOR MUDA
16.	RISKHA AMALLIA INDRIAWATI, S.H., M.Si.	198011092010012013	AUDITOR MUDA
17.	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.	198410302010012027	AUDITOR MUDA
18.	SUPRAYITNO, S.T.	197704202011011003	AUDITOR MUDA
19.	WAHYUNINGSIH, S.H.	197607102010012022	AUDITOR MUDA
20.	ARTTIKA RAHMA SARI, S.E., M.Ak.	198412042011012016	AUDITOR MUDA
21.	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.	197608222006041004	P2UPD MUDA
22.	BASRI SETYOWATI, S.Sos.	196805211993122001	P2UPD MUDA
23.	C ANDI MURTOPO, S.Sos.	197812171998031002	P2UPD MUDA
24.	NURUL BADRIYAH, S.E.	197802262005012010	PERENCANA AHLI MUDA
25.	JAKA MARYANTO, S.H.	197311172009061001	AUDITOR PERTAMA
26.	SUTIRAH DUWI RAHAYU, S.P.	198301042015032002	AUDITOR PERTAMA
27.	IIS ISTIQOMAH NUR FAJAR, A.Md.	199709182020122003	AUDITOR TERAMPIL
28.	NUR INDAH SARI, A.Md.	199803212020122005	AUDITOR TERAMPIL
29.	DEWI SURYANINGSIH, S.H.	197812082010012014	CALON AUDITOR
30.	MIYA SUNDARI, S.H.	198412142010012026	CALON AUDITOR
31.	RETNO WULANDARI, S.H.	198603042010012032	CALON AUDITOR

1	2	3	4
32.	SURYA AFRIZAL, S.H., M.M.	198304242010011030	CALON AUDITOR
33.	WAHYU KRISTİYANTO, A.Md.Kom.	199803092022031005	CALON PRANATA KOMPUTER

2.4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	FAUZY HENDRO PURNOMO, S.E.	198606102011011012	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, S.E.	197906252011011004	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	ENDANG YUNIATI, S.Ak.	197708122009022003	Bendahara
4.	PURWADI	197711262010011002	Pengadministrasi Umum
5.	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.	198708192010122006	Penyusun Rencana Pengawasan
6.	SUGIYONO	197303262007011021	Petugas Keamanan

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,13 skor Ket. :
2		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,00 skor Ket. : Nilai Kapabilitas APIP masih menggunakan skor tahun 2024 karena proses penilaian oleh BPKP masih dalam proses

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 3.100.000,00 Realisasi: Rp. 968.400,00 Persentase: (31,24%)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43 laporan	42 laporan (97,67%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 378.000.000,00 Realisasi: Rp. 186.275.000,00 Persentase: (49,28%)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 paket	12 paket (100%)		

			Daerah				
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran: Rp. 31.244.100,00 Realisasi: Rp. 14.366.100,00 Persentase: (45,98%)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16 laporan	14 laporan (87,50%)	
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 8.993.250,00 Realisasi: Rp. 8.993.250,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Capaian dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan	1 laporan (100%)	
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A,	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 6.647.300,00 Realisasi: Rp. 6.647.300,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan (100%)	

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase: (100,00%)	Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan			
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 11.415.000,00 Realisasi: Rp. 6.122.200,00 Persentase: (53,63%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 laporan	14 laporan (100%)		
				3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 6.500.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (61,54%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen	12 dokumen (100%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 77.800.000,00 Realisasi:	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 17 unit	17 unit (100%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 77.800.000,00 Persentase: (100,00%)				
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 25.203.500,00 Realisasi: Rp. 24.369.000,00 Persentase: (96,69%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipeliha ra/direhabilitasi 4 paket	4 paket (100%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 22.183.375,00 Realisasi: Rp. 20.399.000,00 Persentase: (91,96%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi 12 paket	12 paket (100%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 148.113.400,00 Realisasi: Rp. 147.252.200,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 dokumen	2 dokumen (100%)		

			A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase: (99,42%)				
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 773.166.000,00 Realisasi: Rp. 436.887.392,00 Persentase: (56,51%)	Jumlah Jam Pelajaran pendidikan dan pelatihan pengawasan 120 jumlah	95 jumlah (79,17%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 100.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 paket	1 paket (100%)		

				2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 2.650.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.579.222.000,00 Persentase: (97,33%)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 unit	1 unit (100%)		
				3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 700.000.000,00 Realisasi: Rp. 591.200.000,00 Persentase: (84,46%)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 2 unit	2 unit (100%)		
				4) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 715.700.000,00 Realisasi: Rp. 688.506.995,00 Persentase: (96,20%)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 paket	2 paket (100%)		
				5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 690.883.715,00 Realisasi: Rp. 527.652.000,00 Persentase: (76,37%)	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 8 paket	8 paket (100%)		
				6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	4 paket (100%)		

				Anggaran: Rp. 629.223.900,00 Realisasi: Rp. 461.937.857,00 Persentase: (73,41%)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 paket			
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 32.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.500.000,00 Persentase: (54,69%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen	12 dokumen (100%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Anggaran: Rp. 5.165.760,00 Realisasi: Rp. 2.185.000,00 Persentase: (42,30%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang- undangan yang disediakan 12 paket	12 paket (100%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 94.196.600,00	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan 11	9.1 paket (82,73%)		

				Realisasi: Rp. 54.376.100,00 Persentase: (57,73%)	paket			
				3) Penyediaan Bahan/Material Anggaran: Rp. 143.850.325,00 Realisasi: Rp. 143.849.625,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Bahan/Material yang disediakan 9 paket	9 paket (100%)		
				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 80.855.530,00 Realisasi: Rp. 75.069.600,00 Persentase: (92,84%)	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 9 paket	9 paket (100%)		
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 8.617.156.702,00 Realisasi: Rp. 7.324.648.278,00 Persentase: (85,00%)	Jumlah bulan penerimaan Gaji dan Tunjangan 12 bulan	12 bulan (100%)		
			m PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran:	Jumlah Penyediaan jasa	12 bulan (100%)		

			MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 165.936.000,00 Realisasi: Rp. 107.733.101,00 Persentase: (64,92%)	komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan			
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 289.405.500,00 Realisasi: Rp. 149.670.000,00 Persentase: (51,72%)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan	12 bulan (100%)		
			n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 465.116.520,00 Realisasi: Rp. 425.885.781,00 Persentase: (91,57%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perijinannya 12 bulan	12 bulan (100%)		

			o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 12.320.500,00 Realisasi: Rp. 10.002.000,00 Persentase: (81,18%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan	12 bulan (100%)		
			p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 72.416.025,00 Realisasi: Rp. 71.028.200,00 Persentase: (98,08%)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 paket	10 paket (100%)		
				2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 242.734.500,00 Realisasi: Rp. 163.772.918,00 Persentase:	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 laporan (100%)		

				(67,47%)				
			q. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 48.000.000,00 Realisasi: Rp. 40.142.000,00 Persentase: (83,63%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 dokumen	7 dokumen (100%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
----	---------------------	-------------	----------------------	---------------------	--------	-----------	--------------	-----------------

							PERMASALAHAN
1.	INSPEKTORAT		a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Kerja Sama Pengawasan Internal Anggaran: Rp. 164.631.200,00 Realisasi: Rp. 99.515.750,00 Persentase: (60,45%)	Jumlah Sosialisasi MoU Kesepakatan Kerjasama APIP dan APH 1 dokumen	1 dokumen (100%)	
			b. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Anggaran: Rp. 619.107.500,00 Realisasi: Rp. 486.721.650,00 Persentase: (78,62%)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 kegiatan	12 kegiatan (100%)	
			c. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Anggaran: Rp. 1.030.598.750,00 Realisasi: Rp. 562.320.418,00 Persentase: (54,56%)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 1 Lap Monitoring TL Rekomendasi SAKIP pada 42 OPD 42 dokumen	42 dokumen (100%)	

			d. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Anggaran: Rp. 145.596.750,00 Realisasi: Rp. 58.422.750,00 Persentase: (40,13%)	Jumlah tindak lanjut atas penugasan pemeriksaan khusus 25 laporan	25 laporan (100%)		
			e. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Anggaran: Rp. 111.422.250,00 Realisasi: Rp. 49.404.750,00 Persentase: (44,34%)	Jumlah kegiatan Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8 opd	8 opd (100%)		
				2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Anggaran: Rp. 114.960.750,00 Realisasi: Rp. 76.570.250,00 Persentase: (66,61%)	Jumlah LHE Rencana Aksi Revormasi Birokrasi Tematik dan Jeneral 5 dokumen	5 dokumen (100%)		
				3) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran: Rp. 218.496.000,00 Realisasi:	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern	41 opd (100%)		

				Rp. 151.384.550,00 Persentase: (69,28%)	Pemerintah Kabupaten Karanganyar 41 opd			
			f. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PENG AWASAN, Kegiatan Peny elenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Anggaran: Rp. 208.790.000,00 Realisasi: Rp. 168.881.000,00 Persentase: (80,89%)	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 14 laporan	14 laporan (100%)		
			g. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PENG AWASAN, Kegiatan Peny elenggaraan Pengawasan Internal	1) Pengawasan Desa Anggaran: Rp. 352.072.225,00 Realisasi: Rp. 333.177.125,00 Persentase: (94,63%)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa 44 laporan	44 laporan (100%)		
				2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 487.973.500,00 Realisasi: Rp. 478.193.400,00 Persentase: (98,00%)	Jumlah OPD yang diperiksa 32 Laporan	32 Laporan (100%)		
				3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 376.791.500,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4 opd (100%)		

				Realisasi: Rp. 323.788.000,00 Persentase: (85,93%)	Pemerintah Daerah 4 opd			
			h. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Anggaran: Rp. 89.937.500,00 Realisasi: Rp. 73.628.100,00 Persentase: (81,87%)	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1 rekomendasi	1 rekomendasi (100%)		
				2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Anggaran: Rp. 39.637.900,00 Realisasi: Rp. 25.205.650,00 Persentase: (63,59%)	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
			i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Review Laporan Keuangan Anggaran: Rp. 217.568.500,00 Realisasi: Rp. 170.370.650,00 Persentase: (78,31%)	Jumlah review LKPD, LK OPD, dan DAK 41 laporan	41 laporan (100%)		

				2) Reviu Laporan Kinerja Anggaran: Rp. 125.740.000,00 Realisasi: Rp. 79.896.000,00 Persentase: (63,54%)	Jumlah reviu laporan kinerja 42 laporan	42 laporan (100%)		
--	--	--	--	---	---	----------------------	--	--

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VII**INOVASI DAN PENGHARGAAN****A. INOVASI**

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
------------	---------------------	------------------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	10 besar MCP Jawa Tengah	KPK

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat Daerah sebagai Unsur Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Selain tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar juga mempunyai fungsi sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan asset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Juga meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama Tahun Anggaran 2025 tugas pokok dan fungsi tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup menghambat kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;

B. SARAN

Peningkatan pelaksanaan program Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik di Inspektorat Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada umumnya. Termasuk didalamnya peningkatan Kapabilitas APIP itu sendiri;
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009